AL-‘UQŪD AL-MURAKKABAH SEBAGAI PROGRESIFITAS MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Mawardi

Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu_Syamsuri@yahoo.com

Abstrak

Al-‘Uqūd al-murakkabah merupakan metode pengembangan akad yang pada saat ini dipraktikkan hampir di seluruh lembaga keuangan syariah, bank atau pun non bank. Secara normatif pengembangan *al-‘uqūd al-murakkabah* terdapat beberapa metode yang harus menjalin kebolehannya secara syariah. Namun secara normatif pada dasarnya banyak ikhtilaf yang mesti senantiasa ditulis sebagai bagian dari referensi normatif. Dalam tulisannya ini, *al-‘uqūd al-murakkabah* dianalisis dari perspektif *progresifitas maqāṣid syarī’ah*, dengan harapan dapat ditemukan aspek titik temu antara tujuan syariah dan tujuan ekonomi melalui metode *al-‘uqūd al-murakkabah*.

Kata kunci; *al-‘uqūd al-murakkabah*, *progresifitas*, *maqāṣid syarī’ah*.

Abstract

Al-‘Uqūd al-murakkabah is a contract development method which is currently practiced in almost all sharia financial institutions, banks or non-banks. Normatively, the development of *al-‘uqūd al-murakkabah* has several methods that must establish their ability in sharia.

However, normatively, there are many rules that must always be written as part of normative references. In this paper, *al-‘uqūd-murakkabah* is analyzed from the perspective of progressif of *maqāṣid asy-syarī’ah*, with the hope that it can be found the meeting point between sharia objectives and economic goals through the *al-‘uqu method> d al- murakkabah*.

Keywords; *al-‘uqūd al-murakkabah*, *progressif*, *maqāṣid asy-syarī’ah*.

A. Pendahuluan

Dalam skala nasional, metode *al-'uqūd al-murakkabah* atau *hybrid contract* dipopulerkan oleh Hasanudin, Dosen FSH-UIN Syahid dan IIQ Jakarta, Pengurus DSN-MUI, dalam disertasinya yang berjudul *Konsep dan Dhawabith Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI*, dan tulisannya “Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh”.¹ Dari kedua tulisan tersebut, maka kajian tentang *al-'uqūd al-murakkabah/hybrid contract* mulai populer di Indonesia.

Adapun beberapa literatur yang banyak menjadi rujukan juga ditulis oleh Nazih Hammād dalam bukunya yang berjudul *al-'Uqūd al-Murakkabah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Ia menulis:

العقود المركبة: أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشمل على عقدين فأكثر، كالبيع والإجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والمزارعة والشركة والمضاربة...، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع العقود والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التقريق والتجزئة والإنفصال، بمثابة آثار العقد الواحد.²

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-'uqūd al-murakkabah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak atas transaksi mu'amalah yang memuat atas dua akad atau lebih, seperti akad *al-bay* (jual beli) dengan *al-ijārah* (sewa), *al-hibah* dengan *al-wakālah* (perwakilan), *al-qardh* (pembinaan sosial) dengan *muzārah* (kerjasama pertanian), *ṣarf* (valuta asing) dengan *muzārah* (kerjasama pertanian), *syirkah* (kerjasama usaha) dengan *mudjārabah* (kerjasama permodalan dan usaha).

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam *al-'uqūd al-murakkabah* terdapat beberapa akad yang mewajibkan untuk dikumpulkan atau dikombinasikan, dan dari pengumpulan atas akad-akad tersebut diikat sehingga menjadi nama dalam satu akad, tidak boleh lagi dipisahkan antar akad yang digabungkan tersebut. Karena *al-'uqūd al-murakkabah* telah ditetapkan dampak hukumnya seperti satu akad.

Abdullah Ali Saifi menjelaskan dalam tanya jawabnya:

¹ Tulisan Hasanudin dapat diakses pada (http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20IAEI_Multi_Akad_Hasanudin.pdf).

² Nazih Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1432 H/2011 M), hlm. 7.

العقود المركبة هي العقود المتعددة التي تجتمع في عقد على سبيل الاشتراط أو الاجتماع بحيث تعتبر جميع الآثار المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.³

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-'uqūd al-murakkabah* adalah beberapa akad yang dikumpulkan dalam satu akad atau kontrak perjanjian sebagai jalan persyaratan (sahnya perjanjian). Atau penggabungan tersebut diharapkan semua pengaruhnya atas akad-akad yang digabungkan tersebut, dianggap seperti pengaruh dari satu akad saja.

Lebih lanjut Saifi menjelaskan sebagian menyebut jenis akad ini dengan *العقود المختلطة* (*contract mixed*). Tapi yang paling umum menyebutnya dengan *al-'uqūd al-murakkabah*.⁴

Saifi juga menjelaskan pengertian *al-'uqūd al-murakkabah* secara istilah fiqh dengan kalimat berikut:

أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه.⁵

Di dalam akad terdapat dua hal, bermakna *khās* dan *ām*. Yang dimaksud dengan makna *ām* mutlak bagi setiap kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri disebut apakah dia terikat oleh kewajiban lain atau tidak, dan apakah itu kewajiban religius seperti sumpah, atau duniawi seperti penjualan, dan lain-lain.

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي⁶

Sedangkan untuk arti khusus yaitu akad yang didasarkan pada setiap kesepakatan antara dua atau lebih waran untuk menetapkan atau mengalihkan suatu kewajiban, hanya dapat dicapai oleh dua atau lebih pihak. Inilah makna utama menurut para fuqaha untuk mengartikan akad secara istilah fiqh.

al-'Uqūd al-murakkabah dikonstruksi untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan Islam kontemporer yang menemukan kompleksitas dalam

³ Abdullah bin Malik Mubarak Ali Saifi, "Al-Uqud al-Murakkabah", dalam *AL-Alukah* (online), 30-12-2012 M/16-2-1434 H, (<http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/48477>)

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Khalid al-Turkimāni, *D}awābit al-Aqd fi> al-Aqd fi> al-Aqd al-Islāmi>*, hlm. 24, Abd al-Hami>d al-Ba'li>, *D}awābit al-'Uqu>d*, hlm. 44.

mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non Islam, tapi selaras dengan kebutuhan transaksi-transaksi modern.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang *al-'uqūd al-murakkabah*. Dengan beberapa alasan akademik;

1. Dari beberapa pengertian atau teori konseptual tentang *al-'uqūd al-murakkabah*, maka menurut penulis masih mengandung unsur kajian akademik yang lebih mendalam.
2. Problem utama yang terjadi adalah dalam menselaraskan antara landasan hukum normatif syariah berhadapan dengan kompleksitas transaksi ekonomi modern. Dari sini kemudian lahir banyak akad-akad “tidak bernama” atau akad-akad yang dihasilkan dari berbagai kompilasi.

B. Pembahasan

1. Fenomena *al-'Uqūd al-Murakkabah*

Al-'Uqūd al-murakkabah berakar kata dari isim mufrod “*aqd*” dan “*murakkab*”.

Sedangkan untuk arti khusus yaitu akad yang didasarkan pada setiap kesepakatan antara dua atau lebih waran untuk menetapkan atau mengalihkan suatu kewajiban, hanya dapat dicapai oleh dua atau lebih pihak. Inilah makna utama menurut para fuqaha untuk mengartikan akad secara istilah fiqh.

Lafaz *murakkab* berasal dari kata “رَكَّبَ - يُرَكِّبُ - تَرْكِيْبًا”. Dalam *Kamus Arab-Indonesia Al-'Asyri*, dituliskan رَكَّبَ sinomin dengan lafad *jama'a*, *djamma*, *allafa*, *ansya'a*, *aqāma*, dan *adkhala*, yang berarti menyusun, mengumpulkan, menggabungkan, membentuk, dan menyisipkan.⁷

Sedangkan kata *murakkab* (مُرَكَّب) mempunyai beberapa padanan kata; *mujamma* (مُجَمَّع) yang berarti yang dirakit, diasembling, disusun, dikombinasikan, *muallaf min* (مُؤَلَّف مِن) yang berarti yang tersusun/terbuat dari, *djiddu basīt* (ضَدَّ بَسِيْط) berarti yang kompleks, bercampur, *majmū'at* (مَجْمُوعَة) yang berarti kombinasi (dari berbagai bahan).⁸

⁷ Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus 'Arab Indonesia Al-'Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 988.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1693.

M. Siddiq al-Jawi menjelaskan terdapat beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang sepadan atau bermakna sama dengan *al-'uqūd al-murakkabah*, yaitu *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, *al-jam'u bayna al-'uqūd*, *damju al-'uqūd*. Siddiq menjelaskan istilah *al-'uqūd al-murakkabah* terdapat dalam kitab *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, karangan Nazīh H{ammad,⁹ *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah* ditulis oleh Abdullah al-'Imrānī dalam kitabnya *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*.¹⁰

Istilah *al-'uqūd al-murakkabah* juga ditulis dengan *Damju al-'Uqūd* (دمج العقود) oleh Ismail Syandi dalam kitabnya *Al-Musyārah al-Mutanāqis{ah}*.¹¹ Istilah *al-jam'u bayna al-'uqūd* digunakan oleh AAOIFI dalam kitab *Al-Ma'yir asy-Syar'iyyah/Shariah Standards*, edisi 2010.¹²

Najamuddin, Dosen Ekonomi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam (FAI) Universitas Islam Indragiri Tembilahan, menjelaskan terdapat beberapa pengertian *murakkab* dalam fiqh, yaitu:

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal atau *basīt*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.¹³

Mencermati tiga pengertian di atas yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna yang lebih mendekati dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal

⁹ Nazīh H{ammad *Al-'Uqud al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 7.

¹⁰ Abdullah al-'Imrānī, *Al-'Uqud al-Māliyah al-Murakkabah*, hlm. 46.

¹¹ Ismail Syandi, *Al-Musyārah al-Mutanāqis{ah}*, hlm. 17-18.

¹² M. Siddiq al-Jawi, "Hukum Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah)", *Islamic Economic Knowledge (online)*, (<http://ilmu-iqtishoduna.blogspot.co.id/2015/06/hukum-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>), diakses tanggal 15 Februari 2018.

¹³ Najamuddin, "Al-'Uqūd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013, hlm. 8.

itu. Meskipun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.¹⁴

al-'Uqūd al-murakkabah dikonstruksi untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan Islam kontemporer yang menemukan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non Islam, tapi selaras dengan kebutuhan transaksi-transaksi modern.

Problem utama yang terjadi adalah dalam menselaraskan antara landasan hukum normatif syariah berhadapan dengan kompleksitas transaksi ekonomi modern. Dari sini kemudian lahir banyak akad-akad “tidak bernama” yang dihasilkan dari berbagai kompilasi.

Hasil produk kompilasi tersebut terkenal dengan beragam istilah, tapi yang paling populer adalah *al-'uqūd al-murakkabah* atau *hybrid contract*. Karena kata *murakkabah* (*murakkab*) secara etimologis dapat berarti *al-jam'u*, yang berarti kombinasi atau kompilasi dari sesuatu, maka terdapat pula yang menyebut *al-'uqūd al-murakkabah* dengan kombinasi kontrak (*ijtimā' al-uqūd*).

Hibryd contract dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “kontrak hibrida” sering disinonimkan dengan istilah *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad-akad bertingkat. Terdapat pula yang menamakannya dengan kombinasi kontrak (*ijtimā' al-uqūd*).

Beberapa tulisan yang mensamakan antara *al-'uqūd al-murakkabah* dengan *hibryd contract* adalah Muhammad Iman Sastra Mihajat, dalam tulisannya yang berjudul “*Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development*,”¹⁵ Lutfi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Iman Sastra Mihajat, “Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development”, *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business (online)*, (www.iiste.org), Vol 7, No.16 (Special Issue), 2015. Co-Published with Center for Research on Islamic Management and Business, (<http://www.crimbbd.org>).

Sahal, "Implementasi *Al-'Uqud al-Miurakkabah Atau Hybrid Contracts* (Multi Akad) Gadaai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian.¹⁶

Model *al-'uqud al-murakkabah* atau akad ganda atau *hybrid contract*, mulai diterjemahkan dengan "kontrak hibrida", akad berganda, akad gabungan, atau multi akad di mana istilah-istilah tersebut merupakan hal yang sama hanya beda bahasa.

Al-'Uqud al-murakkabah dilatarbelakangi oleh suatu ketidakberdayaan satu pihak untuk memenuhi supaya terjadinya transaksi produk bank atau untuk menjaga efektifitas manajemen bank sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad yang sesuai syariah.

Dalam dunia perbankan, *al-'uqud al-murakkabah* seperti pada produk *murābahah* dengan menggunakan akad *murābah}ah bil wakālah*. Secara sederhana dapat dijelaskan pada saat produk *murābah}ah* akan dilaksanakan, bank tidak lagi menggandeng *supplier* dalam pemenuhan barang yang akan dibeli nasabah. Tapi bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan memberi kebutuhan barang sebagaimana yang telah disepakati pada akad. Dengan mewakilkan bank kepada nasabah maka secara operasional bank akan lebih efektif.

Akad *murābah}ah bil wakālah* sangat cocok dipraktikkan untuk kebutuhan jual beli barang yang tidak *new product* atau *second hand*. Artinya, pada saat nasabah ingin mempunyai mobil padahal kemampuan daya belinya di bawah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), maka sangat tidak efektif jika menggunakan akad *murābah}ah* secara sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan pengembangan yaitu dibarengkan dengan akad *al-wakālah*.

Praktik *al-'uqud al-murakkabah* berbeda dengan tawaran dua akad untuk satu transaksi yang dilarang oleh fiqh. Praktik yang dilarang seperti satu barang dijual dengan dua pilihan akad *cas* dengan harga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) atau dengan kredit tapi harga menjadi Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).

¹⁶ Lutfi Sahal, "Implementasi *Al-'Uqud Al-Murakkabah Atau Hybrid Contracts* (Multi Akad) Gadaai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian", dalam *Jurnal At-Taradhi*, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015.

Najamuddin, Dosen Ekonomi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indragiri Tembilahan, dalam tulisannya yang berjudul "*Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*" menjelaskan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.¹⁷

Pada saat ini, telah populer istilah *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad yang diterjemahkan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi atau muamalah yang meliputi dua unsur akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan, hak dan kewajiban yang ditimbulkan, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, sama kedudukan dengan akibat-akibat hukumnya dengan satu akad.¹⁸

Arbouna,¹⁹ "The Combination of Contracts in *Shariah*: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance".²⁰ Kombinasi kontrak merupakan mekanisme potensial pengembangan produk di bidang keuangan syariah. Namun, konsep ini menghadapi masalah hukum karena hadis yang melarang dua kontrak dalam satu kesepakatan. Artikel tersebut memperjuangkan validitas penggabungan dua atau lebih kontrak untuk menyusun produk yang sesuai dengan syariah. Ini membahas banyak aspek kombinasi kontrak, termasuk terminologi dan tujuan kontrak, tingkat ketidakpastian dan ambiguitas, dan sifat tawar-menawar dalam kontrak gabungan. Jika kontrak digabungkan melewati ujian yang ditetapkan oleh prinsip hukum, tidak akan ada keberatan hukum untuk menggabungkan kontrak semacam itu menjadi satu kesepakatan.²¹

Lebih lanjut Arbouna menjelaskan tidak ada definisi seperti itu untuk kombinasi kontrak dalam literatur fiqh. Namun, kombinasi kontrak (*ijtimā al-'uqud*) dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk mengumpulkan dua atau lebih kontrak dengan berbagai fitur dan

¹⁷ Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dr. Arbouna bekerja pada the Kuwait Finance House-Bahrain (KFH-B).

²⁰ Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in *Shariah*: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance", dalam *Thunderbird International Business Review*, Vol. 49 (3), 341-369, May-June, 2007, Published online dalam Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).

²¹ Arbouna, "The Combination", hlm. 342.

konsekuensi hukum untuk mencapai transaksi layak yang diinginkan. Dalam hal ini, semua kewajiban dan konsekuensi hukum yang timbul dari kontrak gabungan harus direalisasikan sebagai satu kewajiban tunggal.²²

Mihajat,²³ dalam tulisannya yang berjudul “*Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development*,”²⁴ menjelaskan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah yang pesat mengesankan bank harus menyediakan produk dan layanan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan, terutama di era transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang digunakan dalam perbankan syariah lebih rumit daripada yang sebelumnya dan menyiratkan bahwa produk dan layanan baru di bidang keuangan syariah akan menggunakan lebih dari satu kontrak dalam satu transaksi.²⁵

Beberapa peneliti seperti Al-Shadhily (1998), Abu Guddah (2000), Arbouna (2007); dan Dusuki (2009) telah meneliti konsep *kontrak hibrida* di bidang keuangan syariah dan penerapannya untuk tujuan pengembangan produk di perbankan syariah dan keuangan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pedoman dan parameter syariah dalam kontrak hibrida untuk memudahkan praktisi dalam industri perbankan syariah di Indonesia adalah sesuatu yang mendesak untuk dimulai.²⁶

Mihajat lebih lanjut menjelaskan tidak ada definisi seperti *hybrid contracts* untuk kombinasi kontrak dalam literatur Fiqh. Namun, istilah kombinasi kontrak yang dalam bahasa Arab populer dengan *'uqud al-murakkabah* yang berarti dua atau lebih kontrak yang ditunjuk dalam satu transaksi tunggal.

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Iman Sastra Mihajat, Ph.D Researcher of IRTI Islamic Development Bank, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.

²⁴ Muhammad Iman Sastra Mihajat, “Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development”, EJBMS-Special Issue: Islamic Management and Business (*online*), (www.iiste.org), Vol 7, No.16 (Special Issue), 2015. Co-Published with Center for Research on Islamic Management and Business, (<http://www.crimbbd.org>).

²⁵ Mihajat, “Hybrid Contract, hlm. 89.

²⁶ *Ibid.*

Menurut Hammad dan al-'Imrāni (2006), *al-'uqūd al-murakkabah* adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi tertentu yang terdiri dari dua kontrak atau lebih.

Hammad mendefinisikan kombinasi kontrak sebagai kesepakatan antara kedua pihak atau lebih untuk melaksanakan kontrak yang mengandung dua atau lebih kontrak (seperti perjanjian sewa dan beli, hibah dan *wakālah*, *qard*}, *muzāra'ah*, *s}arf* (pertukaran mata uang), *musyārahah*, *mud}ārahah*, dan sebagainya) dengan berbagai fitur dan konsekuensi hukum untuk mencapai transaksi layak yang diinginkan. Semua dampak hukum dan konsekuensi dari kesepakatan kontrak hibrida, serta semua hak dan kewajibannya dipandang sebagai satu kesatuan dan terbagi, sebagai akibat hukum kontrak.²⁷

Sedangkan menurut Al-'Imrāni, kombinasi kontrak adalah kombinasi beberapa kontrak dalam transaksi tertentu yang terkandung dalam dua kontrak atau lebih, digabungkan atau timbal balik, di mana semua hak dan kewajiban hukum yang dihasilkan dari kontrak dipandang sebagai konsekuensi dari kontrak.²⁸

AAOIFI (Standar Syariah No. 25/2008: 451) mendefinisikan kombinasi kontrak sebagai proses yang berlangsung antara dua pihak atau lebih, dan memerlukan kesimpulan simultan dari lebih dari satu kontrak. Kombinasi kontrak dapat mengambil (i) menggabungkan lebih dari satu kontrak tanpa memaksakan salah satu dari mereka sebagai kondisi di sisi lain, dan tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukannya, atau (ii) menggabungkan lebih dari satu kontrak sementara memaksakan beberapa dari mereka sebagai kondisi di sisi lain, tanpa kesepakatan sebelumnya untuk melakukannya, atau (iii) menggabungkan lebih dari satu kontrak yang tunduk pada kesepakatan sebelumnya, tanpa memaksakan salah satu dari mereka sebagai persyaratan pada pihak lain, atau (iv) kesepakatan untuk

²⁷ Nazi>h Hammād, *al-'Uqu>d al-Murakkabah Fi> al-Fiqh al-Islāmi>*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1432 H/2011 M), hlm. 7.

²⁸ Abdullah bin Mu}ammad bin Abdullah Al-'Imrāni>, *al-'Uqu>d al-Māliyah al-Murakkabah (Dirāsāt Fiqhiyyah Ta's}i>liyah wa Tat}bi>qiyat*, (Riyād): Dār Kanu>z Isbi>liya Linnasyr wa at-Tauzi>', 1431 H/2010 M), hlm. 46.

menyelesaikan kesepakatan melalui bentuk kontrak yang berbeda seperti yang akan diputuskan kemudian di masa depan.²⁹

Dasar pemikiran untuk kebutuhan penggabungan kontrak dari perspektif fiqh adalah menghindari transaksi *ribāwī*. Misalnya, kombinasi antara penjualan dan pertukaran mata uang untuk menghindari transaksi riba untuk memenuhi permintaan ekonomi, mata uang jual (Rupiah Indonesia) bersama dengan komoditas dolar A.S. dengan dasar pembayaran yang ditanggguhkan.

Contoh lain adalah menjual dua rumah oleh penjual kepada pembeli dengan dua perjanjian kontrak, rumah pertama dengan kontrak penjualan, rumah kedua dengan kontrak *ijārah*, yang menggabungkan penjualan (*bay'*) dan *ijārah* pada saat bersamaan.

Kombinasi kontrak berbeda dengan *isytirāt 'aqd fī 'aqd* (mengikat satu kontrak dengan kontrak lain) atau dikenal dengan *bay'atayn fī bay'ah* yang dilarang hukum Islam. Akad *bay'atayn fī bay'ah* seperti seseorang mengatakan “Saya menjual rumah saya seharga Rp100 juta dengan syarat harus membeli mobil saya seharga Rp 80 juta, atau dengan syarat Anda harus menjual mobil Anda seharga 80 juta.”³⁰

3. Al-'uqūd al-Murakkabah sebagai Progresifitas Maqās'id asy-Syari'ah

Dalam kehidupan yang sangat modern dan banyak aspek yang saling terkait di dalam kehidupan antara hukum syari'ah dengan hukum sosial, termasuk di dalam lembaga keuangan, maka banyak tujuan syariah yang dipraktikkan dalam ragam sistem dan lembaga yang bersifat kontemper.

Dalam kaitan ini, menurut penulis, kehadiran bank syariah tidak sekedar sebagai media atau alat bisnis di lembaga keuangan, tapi juga sebagai bagian dari tujuan syari'ah. Ini terlihat dari latar belakang pendirian dan pengertian bank syariah yang dijelaskan oleh beberapa pakar.

Abdurahman dan Shittu,³¹ menjelaskan:

²⁹ Mihajat, “Hybrid Contract”, hlm. 91.

³⁰ Mihajat, “Hybrid Contract”, hlm. 90-91.

³¹ Zaka Abdurahman adalah mahasiswa pada the Department of Economic Education, the University of Jos. Dr. Huud Shittu adalah Senior Lecturer bidang Islamic Law and Culture pada the Department of Religion and Philosophy, University of Jos, Jos Plateau, Nigeria.

*Islamic banking is financial intermediation based on Islamic law; it is guided and codified within the frame of Islamic law called Fiqh al-Muamalat (Islamic rules on transactions) by the Qur'an, the Sunnah (teachings and practices of Prophet Muhammad) including other secondary sources of Islamic law such as opinions collectively agreed among the scholars (Ijma), Analogy (Qiyas) and personal reasoning (Ijtihad).*³²

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbankan Islam adalah intermediasi keuangan berdasarkan hukum Islam yang dikodifikasikan dalam kerangka hukum Islam dengan merujuk pada Fiqh al-Muamalat (peraturan Islam tentang akad dan transaksi ekonomi), al-Qur'an, Hadis. Selain daripada sumber hukum Islam tersebut, aturan perbankan syariah juga merujuk pada sumber hukum Islam sekunder lainnya seperti pendapat yang disetujui secara kolektif antara para ilmuwan (*ijmā'*), analogi (*qiyās*) dan penalaran pribadi (*ijtihād*).

Sangat jelas, bank syariah merupakan bentuk beribadah yang selalu merujuk pada sumber hukum Islam. Bank syariah juga merupakan bagian media berijtihad bagi setiap muslim dalam menentukan aspek-aspek yang terkait di dalamnya, termasuk tentang *al-'uqūd al-murakkabah*.

Ah}mad an-Najār, sebagaimana dikutip oleh Syauqī Burūqibat, mendefinisikan bank Islam dengan:

مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها بما يخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي.³³

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan yang dimaksud dengan lembaga keuangan Islam (termasuk perbankan Islam) yaitu aktifitas untuk mengumpulkan dana (modal) dan memperdayakannya dengan sesuatu yang bertujuan untuk membangun, mengumpulkan kesempurnaan dengan cara

³² Zaka Abdurahman dan Huud Shittu, "Islamic Banking and Its Implications on Human Capital Development in Nigeria", dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Juli-September 2016, hlm. 26

³³ Ah}mad an-Najār, "Al-Mas}ārif al-Islāmiyat", dalam *Majalat al-Muslim al-Ma'ās}ir*, Vol. 24, Beirut Libanon, 1982, hlm. 63. Syauqi> `Buru>qibat, "al-Kafa'at at-Tasyghi>liyat Lilmas}ārif al-Islāmiyat Dirāsāt Tat}bi>qiyat Muqāranat", *Disertasi* pada Kuliyat al-'Ulu>m al-Iqtisādiyat wa at-Tijāriyat wa 'Ulu>m at-Tasyi>r, Jāmi'at Farh}āt 'Abbās Sat}i>f, 2010-2011, hlm. 4.

Islam, menegakkan keadilan distribusi, dan mempergunakan modal dengan jalan yang Islami.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh Abdurahman dan Shittu, perbankan Islam masih dititikberatkan pada sumber atau landasan praktisnya yaitu sumber hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Ijmā' dan Qiyās.

Sedangkan an-Najār menjelaskan makna perbankan Islam sudah pada aspek *funding* (pengumpulan dana) dan distribusi dana (*financing*), serta aspek pokok sistem ekonomi Islam yaitu penciptaan keadilan dan spirit Islam. Secara implisit, an-Najār mengandung unsur *intermediary* dalam lembaga keuangan Islam.

Menurut H.M. Sadeq, bank Islam tidak sekedar sebagai *financial intermediary*, tapi merevolusi dengan partisipasi nyata dalam bisnis dan mobilisasi dalam pendanaan. Bank Islam juga sebagai “revolusi pendanaan”, yang dapat dibuktikan dengan prinsip *sharing profit and losses* yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga.³⁴

Ziauddin Ahmad, Ex-Deputy Governor of the State Bank of Pakistan, menjelaskan bahwa sistem *interest* (bunga) memang sudah sangat mendominasi di dalam transaksi ekonomi dan keuangan modern. Padahal dalam sejarah, sistem *interest* sudah dilarang sejak era Aristoteles, yang mengatakan bahwa sistem *interest* laksana “birth of money from money”, melahirkan uang dari uang. Bahkan dalam Kristen disebutkan “*memberi pinjaman dengan bebas, tidak mengharapkan apapun*” (Lukas 6:35), dikatakan oleh banyak komentator sebagai kutukan yang menarik.³⁵

Masyarakat muslim pun mengalami dilema dalam mensikapi sistem *interest*, pada satu sisi punya keyakinan tentang keharaman *ribawi*, pada sisi lain dalam praktik ekonomi dan keuangan modern, sistem *interest* telah menjadi sistem mayoritas.

³⁴ A.H.M. Sadeq, *Islamic Economics*, hlm. 124-125.

³⁵ Ziauddin Ahmad, *Islamic Banking: State Of The Art*, (<http://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/148.pdf>), hlm. 1.

Kemudian para sarjana dan pemikir muslim pada tahun 1960-1970 merumuskan konsep tentang pelarangan sistem *interest* dan membangun sistem perbankan dengan tetap membolehkan keuntungan dengan tidak menggunakan sistem *interest* tapi menggunakan model *profit and loss sharing*. Model yang sebenarnya juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum kedatangan Islam, yaitu transaksi berbasis pada *mudjārabah* dan *musyākarah*.³⁶

Habib Ahmed, dari Durham University Business School, menjelaskan bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, kehadirannya bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*) yang harus terwujud dalam perekonomian yang tumbuh dan keadilan.³⁷

Taqiuddin Mohamad, dkk., menjelaskan sistem bank Islam berbasis pada sistem yang mengikuti prinsip-prinsip syari'ah yaitu:

- 1) Larangan atas riba (*interest*),
- 2) Larangan transaksi *gharar* atau sesuatu yang belum jelas (*uncertainty, risks, speculation*)
- 3) Mengedepankan aktifitas yang halal (diperbolehkan oleh Islam), dan
- 4) Berdasarkan keadilan (yang merupakan etika dan tujuan agama).³⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dalam beberapa aspek berikut; bank Islam dalam pandangan Ziauddin Ahmad sebagai lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem *interest* tapi menggunakan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁷ Habib Ahmed, "Islamic Banking and *Shari'ah* Compliance: A Product Development Perspective", dalam *Journal of Islamic Finance*, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 15.

³⁸ Mohammad Taqiuddin Mohamad, Mohd Yusra Abdullah, Mohd Afifuddin Mohamad, dan Ummu Zainab Al-Abidah Zainal Abidin, "The Historical Development Of Modern Islamic Banking: A Study in South-east Asia Countries", dalam *African Journal of Business Management*, tahun 2013, (<http://www.academicjournals.org/AJBM>), hlm. 16

model *profit and loss sharing*. Habib Ahmed menjelaskan misi bank Islam adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣ'id asy-syari'ah*). Sedangkan Mohamad, dkk., menjelaskan sistem bank Islam sebagai praktik yang berbasis pada sistem yang mengikuti prinsip-prinsip syari'ah.

2. Progresifitas dalam *Maqāṣ'id asy-Syari'ah*

Ismanto menjelaskan pentingnya hukum Islam bagi umat Islam juga sama pentingnya dengan hukum Islam yang mengatur ekonomi, keuangan, dan bisnis.³⁹ Oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang sama, mengingat pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer sebagai akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Perkembangan hukum Islam, terutama di bidang muamalah semakin mempunyai peran penting pada saat ini, terutama di bidang ekonomi, perbankan, asuransi, dan sebagainya.

Dengan adanya perkembangan tersebut, secara nyata mendorong pengembangan hukum ekonomi syari'ah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.

Beberapa faktor yang mendorong hukum ekonomi syariah berkembang dan dikembangkan:

- 1) lahirnya lembaga keuangan syari'ah.
- 2) berkembangnya bisnis umat Islam yang beraneka ragam.
- 3) pandangan masyarakat muslim tentang syari'ah sebagai acuan menyangkut dalam aspek kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Faturahman Djali sebagaimana dikutip oleh Kuat Ismanto, menyatakan untuk memahami persoalan-persoalan kontemporer, pengetahuan tentang *maqāṣ'id asy-syari'ah* mutlak diperlukan.⁴¹ Kelebihan

³⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 120.

⁴⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, hlm. 120-121.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 124.

dari pendekatan tersebut adalah hukum Islam tampak lebih luwes dan tidak kaku, sehingga hukum Islam bercorak kontekstual.

Al-'Uqud al-murakkabah sebagai fenomena perkembangan hukum ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari progresifitas dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Tiga tingkatan kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh asy-Syātībī yang *d}{arūriyat* (primer), *hājiyat* (sekunder), dan *tah}{sīniyat* (tersier),⁴² dapat dianalogikan pada tingkat kebutuhan ekonomi syariah.

a). D{arūriyah

Konsep *d}{arūriyah* secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat atau sepadan dengan konsep primer dalam kebutuhan manusia. Dalam kategori ini ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan yaitu: *ad-dīn* (menjaga agama), *an-naḥs* (melindungi nyawa), *al-'aql* (menjaga akal/intelektual), *al-'nasl* (menjaga keturunan), dan *al- māl* (menjaga harta).⁴³

Kelima hal tersebut adalah yang mutlak harus ada pada diri manusia, yang apabila tidak dapat dipenuhi maka akan mengancam pada keselamatan. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *d}{arūriyah* untuk mewujudkan, memelihara serta menegakkan kemaslahatan agama maupun dunia. *D}{arūriyah* mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan, dan muamalat. Maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilakukan adalah memelihara agama, seperti beriman, mencakup dua syahadah, ṣalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya yang termasuk hal-hal yang wajib dikerjakan. Dalam ranah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal. Dari sudut pandang *d}{arūriyah* dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta, dan termasuk juga dalam memelihara jiwa dan akal.⁴⁴

b. H{ājiyah

⁴² Muslimin Kara, "Pemikiran asy-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Islam", dalam *Jurnal ASSETS*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm.6.

⁴³ Eva Muzlifah, *Maqāṣid Syari'ah*, hlm. 7.

⁴⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi*, hlm. 128-129.

Konsep *hājiyah* secara bahasa berarti kebutuhan sekunder yang apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka tidak sampai menimbulkan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Oleh karenanya keberadaannya di butuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴⁵

Kuat Ismanto mengutip Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan bahwa konsep *maṣlaḥah hājiyah* merujuk pada tujuan menghilangkan kesukaran dan meringankan beban manusia.⁴⁶

c) Tahṣīniyah

Tahṣīniyah adalah kebutuhan tingkat “tersier” yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.⁴⁷

Ketiga tingkatan tersebut bersifat hierarki, yang artinya kebutuhan *tahṣīniyah* tidak boleh dipenuhi sebelum terpenuhinya kebutuhan *hājiyah*, sedangkan kebutuhan *hājiyah* tidak bias dipenuhi sebelum kebutuhan *dārūriyah*.

Fenomena perbankan syariah secara kelembagaan adalah *produk kebutuhan* yang bersifat *tahṣīniyah*, serba modern, bagus, terukur, rasional, dan berbiaya besar dalam pendirian dan operasionalnya.

C. Penutup

al-'Uqud al-murakkabah secara teoritik merupakan bagian dari pengembangan fiqh muamalah dalam bidang perakadan fiqh muamalah.

⁴⁵ Eva Muzlifah, *Maqasid Syari'ah*, hlm. 8.

⁴⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi*, hlm. 130.

⁴⁷ Muslimin Kara, *Pemikiran asy-Syatibi*, hlm. 7.

Bahkan dalam metode pengembangannya bisa dikatakan sangat progresif di bidang *maqāsid asy-syarī'ah*. Hal ini didasarkan pada;

- 1) *al-'uqūd al-murakkabah* merupakan bagian yang cepat dalam mengkomodasi transaksi-transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.
- 2) Fungsi dan *al-'uqūd al-murakkabah* dengan bidang *maqāsid asy-syarī'ah* karena dengan adanya *al-'uqūd al-murakkabah* maka aspek-aspek *maqāsid asy-syarī'ah* dapat dijalankan secara baik. Seperti dalam perlindungan harta, akad, dan lain-lain.

Demikian artikel ini ditulis, semoga bermanfaat.***

Daftar Pustaka

A.H.M. Sadeq, *Islamic Economics*, Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 1989.

Abdullah bin Malik Mubarak Ali Saifi, "Al-Uqud al-Murakkabah", dalam *Al-Alukah (online)*, 30-12-2012 M/16-2-1434 H, (<http://www.alukah.net>)

Abdullah bin Muh}ammad bin Abdullah Al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah (Dirāsāt Fiqhiyyah Ta'sīliyah wa Tat}bīqiyyat*, Riyād}: Dār Kanūz Isbīliyā Linnasyr wa at-Tauzī', 1431 H/2010 M.

Ah}mad an-Najār, "Al-Mas}ārif al-Islāmiyat", dalam *Majalat al-Muslim al-Ma'ās}ir*, Vol. 24, Beirut Libanon, 1982.

Syauqī `Burūqibat, "al-Kafa'at at-Tasyghīliyat Lilmas}ārif al-Islāmiyat Dirāsāt Tat}bīqiyyat Muqāranat", *Disertasi* pada Kuliyat al-'Ulūm al-Iqtisādiyat wa at-Tijāriyat wa 'Ulūm at-Tasyīr, Jāmi'at Farh}āt 'Abbās Sat}īf, 2010-2011.

Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus 'Arab Indonesia Al-'As}rī*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Eva Muzlifah, *Maqaṣid Syari'ah*,.

Habib Ahmed, "Islamic Banking and *Shari'ah* Compliance: A Product Development Perspective", dalam *Journal of Islamic Finance*, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Vol. 3 No. 2, 2014.

Ismail Syandi, *Al-Musyārakah Al-Mutanāqisjah*.

Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Khalid al-Turkimāni, *Djawābit al-Aqd fī al-Aqd fī al-Aqd al-Islāmī*,

Abd al-Hamīd al-Ba'li, *Djawābit al-'Uqūd*.

Lutfi Sahal, "Implementasi *Al-'Uqud Al-Murakkabah* Atau *Hybrid Contracts* (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian", dalam *Jurnal At-Taradhi*, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015.

M. Siddiq al-Jawi, "Hukum Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah)", *Islamic Economic Knowledge (online)*, (<http://ilmu-iqtishoduna.blogspot.co.id>)
Mihajat, "Hybrid Contract, hlm. 89.

Mohammad Taqiuddin Mohamad, Mohd Yusra Abdullah, Mohd Afifuddin Mohamad, dan Ummu Zainab Al-Abidah Zainal Abidin, "The Historical Development Of Modern Islamic Banking: A Study in South-east Asia Countries", dalam *African Journal of Business Management*, tahun 2013, (<http://www.academicjournals.org>)

Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in *Shariah*: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance", dalam *Thunderbird International Business Review*, Vol. 49 (3), 341–369, May-June, 2007, Published *online* dalam Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).

- Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development", *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business (online)*, (www.iiste.org), Vol 7, No.16 (Special Issue), 2015.
- Muslimin Kara, "Pemikiran asy-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Islam", dalam *Jurnal ASSETS*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm.6.
- Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.
- Nazîh Hammād, *al-'Uqûd al-Murakkabah Fî al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1432 H/2011 M.
- Zaka Abdurahman dan Huud Shittu, "Islamic Banking and Its Implications on Human Capital Development in Nigeria", dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Juli-September 2016.
- Ziauddin Ahmad, *Islamic Banking: State Of The Art*, (<http://www.irti.org>)